



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **109.71/PUU/PAN.MK/SP/07/2023**

04 Juli 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023

Yth. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6

Jakarta 10270

Menindaklanjuti perintah Ketua Mahkamah Konstitusi, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "*Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada: a. DPR; b. Presiden; c. DPD; d. MPR; dan e. Mahkamah Agung.*

Sehubungan dengan itu, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, kami sampaikan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI salinan permohonan Nomor 71/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 09.00 WIB.

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI diucapkan terima kasih.

Panitera

Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Sekretaris Jenderal MPR.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 109.71/PUU/PAN.MK/BASP/07/2023**

Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 pukul 11:25 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 71/PUU-XXI/2023 kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta 10270.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Fenny Tri Purnamasari**

